

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara, menurut Socrates bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat obyektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Sedang tugas negara adalah menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat.¹ Sehingga, merupakan tugas pemimpinlah untuk menciptakan stabilitas hukum atau pemerintahan dalam suatu negara.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat dalam dunia internasional, tentulah sudah memenuhi syarat-syaratnya. Indonesia memiliki wilayah, rakyat, diakui masyarakat dunia baik itu secara *de facto* maupun secara *de jure* dan yang tidak kalah penting, Indonesia mempunyai pemerintahan, dimana pemerintah yang melaksanakannya, saat ini dapat dikatakan dipilih secara seksama oleh rakyat, seperti konsep ideal yang digagas oleh Socrates.

Tujuan negara itu adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.² Tidak berbeda dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua.

¹ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal.14

²Ibid, hal. 148

Seperti dikatakan Socrates bahwa tugas negara untuk menciptakan sebuah hukum, maka salah satu tujuan dari dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban di mana pemerintahan itu berlangsung, yakni dengan kata lain sebuah negara, dimana masyarakat di dalamnya memperoleh apa yang disebut dengan perlindungan. Sehingga tercipta suatu pandangan, bahwa tugas pemerintah bukanlah untuk melayani diri sendiri sebagai pejabat yang berkewenangan khusus, melainkan untuk melayani publik, dalam hal ini, rakyat pada sebuah negara.

Adalah tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan rakyatnya dalam segala bidang kehidupan. Bahwa pemerintahan modern, pada hakekatnya, adalah pelayanan kepada masyarakat.³ Dan didukung dengan dinamisasi manusia yang berkembang semakin pesat, menjadikan rakyat semakin mengerti akan pentingnya wawasan politik, akan pentingnya mengetahui hal apa yang berputar di sekitarnya.

Dengan meluasnya wawasan kenegaraan, menjadikan pemerintah bukan lagi sebagai pemegang tunggal kekuasaan. Bahwa rakyat adalah juga sebagai yang berkuasa, dengan pemerintah sebagai eksekutor dari kehendak rakyat yang diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.

Penting bagi masyarakat Indonesia secara luas untuk sadar akan dunia yang berputar di sekelilingnya. Indonesia sebagai negara yang mengusung demokrasi menjadi sistem pemerintahan, sudahlah menjadi keharusan akan pengetahuan masyarakatnya tentang kenegaraan. Hal ini dimaksudkan agar sistem demokrasi yang diusung dapat dengan lancar berlaku di Indonesia,

³M. Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2007), hal.11

bukan lagi embel-embel hanya ikut-ikutan *tren* yang sedang populer di dunia. Atau apakah pemerintahan saat ini, telah memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik, atau sudahkah memenuhi asas-asas pemerintahan demokrasi yang baik.

Pemerintahan Indonesia saat ini, dengan susunan yang masih sama dengan saat awal terbentuknya negara, yakni republik, kembali menggunakan sistem pemerintahan presidensial setelah sempat berganti menjadi parlementer, sampai saat ini tetap menjadikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahannya.

Pemerintah saat ini, tentulah ambil bagian dalam mempertahankan bentuk dan/atau membentuk baru sebuah sistem dalam pemerintahan. Lima tahun masa jabatan, tentulah tidak sedikit perubahan yang dihasilkan. Baik itu yang berdampak positif maupun negatif.

Konsep *governance* dimunculkan sebagai alternatif model dan metode *governing* (proses pemerintahan) yang lebih mengandalkan pada pelibatan seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, semi pemerintah, atau non pemerintah, seperti lembaga bisnis, LSM, komunitas, atau lembaga-lembaga sosial lainnya. Dengan cara pandang itu, sekat-sekat formalitas negara atau pemerintah menjadi terabaikan. Konsep *governance* melihat kegiatan, proses atau kualitas memerintah, bukan tentang struktur pemerintahan, tetapi kebijakan yang dibuat dan efektivitas penerapan kebijakan itu. Kebijakan bukan dibuat oleh seorang pemimpin atau satu kelompok tertentu melainkan muncul dari proses konsultasi antara berbagai pihak yang terkena oleh kebijakan itu.

Pemerintahan bukan lah semata pemerintah dalam hal ini pemimpin atau eksekutif sebagai penyelenggara negara yang notabene duduk di atas menjadi wakil rakyat. Melainkan juga empat dimensi governance yaitu *state*, *civil society*, *economic society*, dan *political society*.

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan persaingan ekonomi, serta berbagai aspek penting dalam kehidupan baik sifatnya makro maupun mikro, membuat masyarakat ikut berpikir tentang dunia yang sedang berputar di sekitarnya. Menjadi menarik untuk mengetahui seperti apa masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai kaum intelektual dan *agent of change*, menilai efektivitas pemerintah yang merupakan wakil rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan saat ini.

Apabila ada pepatah yang mengatakan bahwa “mata adalah jendela dunia”, maka dengan persepsilah, kita pada hakikatnya memandang dunia. Seperti apa dunia yang ada dalam sebuah persepsi, tentulah berbeda-beda berdasarkan beberapa hal yang melatarbelakanginya. Bisa ditentukan melalui dua prinsip persepsi, yaitu *figure* dan *ground*. Lalu seperti apa persepsi seseorang dalam memandang, ditentukan dari bagaimana ia melihat *figure* dan bagaimana ia melihat *ground*. Maka dapat kita katakan, bahwa persepsi itu sendiri bersifat relatif.

Seperti dikutip oleh Mahmud M. Dimiyati, Imanuel Kant mengatakan, “kita melihat benda-benda itu tidak sebagaimana adanya benda-benda itu sendiri, tetapi sebagaimana adanya diri kita”⁴. Bahwa manusia dengan segala kemampuan pengindraannya, cenderung subjektif dalam menilai apa yang

⁴Mahmud M.D., *Psikologi: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: BPFE, 1990) hal. 41

dilihatnya. Hal ini menyebabkan apa yang terlihat bukanlah apa yang sebenarnya, melainkan apa yang ingin dilihat. Sehingga banyak orang bijak mengatakan bahwa manusia melihat apa yang ingin ia lihat, dan mendengar apa yang ingin ia dengar.

Mahasiswa yang katanya berperan sebagai *agent of change* atau agen perubahan, dan pengawal demokrasi, tentulah tidak seharusnya menutup mata dari apa yang terjadi di sekitarnya, terutama sesuatu yang mengorganisir kehidupan, layaknya pemerintah maupun pemerintahan secara umumnya. Jika dahulu Indonesia punya Boedi Oetomo, kini Indonesia punya mahasiswa.

Universitas Negeri Jakarta, sebagai salah satu Universitas yang sudah berdiri lama di Indonesia, tentulah memiliki sejarah tersendiri mengenai kontribusinya pada pemerintah, pemerintahan, bahkan rakyat Indonesia sendiri.

Berawal dari sebuah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia, UNJ yang sekarang berkembang menjadi sebuah institut dengan nama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang sampai sekarang masih akrab di telinga masyarakat dengan sebutannya IKIP Jakarta. Dan kini seiring berkembangnya produktivitas di dalamnya, berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta.

Sebut saja peristiwa Malari, Peringatan Hari Pahlawan 10 November 1977, Reformasi 1998 yang menimbulkan Tragedi Semanggi I dan II, aksi-aksi mahasiswa yang disebutkan di atas, hanya sebagian dari usaha mahasiswa UNJ untuk mengakkan hukum dan demokrasi di negara ini.

Berangkat dari sebuah persepsi itulah, menimbulkan beberapa kemungkinan. Kemungkinan akan tindak lanjut dari persepsi itu sendiri, seperti kecenderungan bertindak atau tidak bertindak. Tindak lanjut dari persepsi yang dikatakan tadi akan kecenderungan bersikap, tentulah mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam penelitian ini, peneliti mengkhususkan pada partisipasi politik mahasiswa.

Maka menjadi menarik bagi peneliti untuk mengetahui tindak lanjut dari persepsi ini, apakah sebuah persepsi mahasiswa, baik itu positif maupun negatif terhadap pemerintahan saat ini, mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang tertuang dalam latar belakang tadi, berikut ini masalah-masalah yang dapat diidentifikasi:

1. Apakah pemerintah Indonesia sudah memenuhi asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik (*Good Governanace*)?
2. Sejauh mana pengetahuan mahasiswa UNJ terhadap asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik (*Good Governance*)?
3. Bagaimana persepsi mahasiswa UNJ terhadap pelaksanaan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik (*Good Governance*)?
4. Bagaimana mahasiswa UNJ berpartisipasi dalam kehidupan politik?
5. Apakah terdapat hubungan antara persepsi terhadap pelaksanaan *Good Governance* dengan partisipasi politik mahasiswa UNJ?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah, yaitu: hubungan persepsi terhadap pelaksanaan *Good Governance* dengan partisipasi politik mahasiswa UNJ. Adapun yang dimaksud persepsi disini adalah persepsi terhadap pemerintah saat ini, apakah sudah memenuhi asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang baik (*good governance*) meliputi cakupan asas-asas penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*), antara lain: (1) asas kepastian hukum; (2) asas tertib penyelenggaraan negara; (3) asas kepentingan umum; (4) asas keterbukaan; (5) asas proporsionalitas; (6) asas profesionalitas; serta (7) asas akuntabilitas. Penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, yang berpusat di Rawamangun, Jakarta Timur.

Sedangkan partisipasi politik yang dimaksud adalah kecenderungan bertindak atau tidak bertindak yang berikutnya dikategorikan dalam partisipasi politik yang konvensional maupun non-konvensional.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah terdapat hubungan antara persepsi terhadap pelaksanaan *Good Governance* dengan partisipasi politik mahasiswa UNJ?”

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaannya, peneliti berharap agar penelitian ini nantinya berguna untuk:

1. Secara khusus sebagai syarat bagi peneliti untuk mendapatkan gelar sarjana dari Program Studi PPKn, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.
2. Untuk mahasiswa sebagai kaum intelektual agar lebih awas terhadap situasi politik yang sedang berlangsung di sekitarnya.
3. Untuk masyarakat luas agar lebih menyadari pentingnya pengetahuan dan pemahaman tentang politik terutama pemerintahan.
4. Sebagai bahan referensi adik-adik mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta.